

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Gunawati et al (2020) dalam penelitiannya yang berjudul evaluasi program kemitraan antara PT Gombek Boer Indonesia dan Kelompok Peternak Kambing (Studi Kasus Kelompok Peternak Kambing Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar) mendeskripsikan terkait program kemitraan dengan menggunakan perspektif pengembangan peternakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa *mixed method* yang merupakan gabungan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sedangkan model evaluasi yang dipakai adalah CIPP context input process product. Dengan memfokuskan program kemitraan maka diperoleh hasil jika pada evaluasi *context* kemitraan PT Gombek Boer memiliki kekurangan pada perencanaan seperti pelatihan, pemasaran, serta pembinaan kepada peternak juga masih dianggap kurang maksimal. Pada evaluasi *input* hal yang menjadi kendala berupa komunikasi yang sangat minim dikarenakan komunikasi hanya akan dilakukan ketika ada masalah. Dalam evaluasi *process*, kendala yang ditemukan yakni berasal dari kedua belah pihak dimana peternak melakukan kecurangan dan PT Gombek Boer Indonesia yang tidak tegas dalam menindaklanjuti masalah tersebut. Adapun evaluasi *product* mendapatkan permasalahan dalam pemasaran yang dilakukan oleh PT Gombek Boer Indonesia sehingga berdampak adanya keterlambatan pembelian ternak ke peternak mitra.

W. Z. S. Utami (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Model Kemitraan Sekolah Dengan Orang Tua Dalam Pembelajaran Online (Studi Kasus Program Pelibatan Keluarga Di Paud Kota Mataram) mendeskripsikan terkait program kemitraan dengan menggunakan perspektif pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian difokuskan untuk mengevaluasi bagaimana program yang telah dibuat oleh sekolah dengan melibatkan orang tua apakah program tersebut mencapai tujuannya. Metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa model CIPP (context input process product), dan

diperoleh hasil pada evaluasi pertama berupa context, berdasarkan 3 kriteria yang ditentukan antara lain kesesuaian program, kebutuhan program, identifikasi penerapan model melalui proses analisis kebutuhan oleh lembaga, maka komponen context telah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya sehingga mendapatkan kategori sangat baik. Kedua, evaluasi input juga berada di kategori sangat baik dikarenakan temuan peneliti di lapangan menyatakan jika prasarana yang disediakan telah memadai dan narasumber yang dipilih merupakan orang-orang yang ahli dibidangnya. Ketiga evaluasi process, dalam evaluasi ini temuan peneliti adalah program yang dilakukan sudah baik karena tingkat kepuasan yang diperlihatkan oleh peserta, hal ini didukung dengan pemberian pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kelima evaluasi product program ini juga dinyatakan memperoleh hasil yang sangat baik.

Loli et al (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Dan Analisis Program Kemitraan Konservasi Di Taman Nasional Bunaken Dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang di Desa Poopoh Kabupaten Minahasa mendeskripsikan terkait manfaat program kemitraan dan faktor apa saja yang mempengaruhi program kemitraan tersebut baik dari internal dan eksternal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, kuantitatif, yang kemudian didukung oleh data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan kelembagaan yang selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Sehingga diperoleh hasil jika manfaat program kemitraan meliputi aspek ekologi yaitu terjadi peningkatan populasi ikan karang.

Yani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Tata Kelola Desa Wisata di Desa Nagamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu mendeskripsikan jika prinsip tata kelola kepariwisataan meliputi partisipasi masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, menjalin kemitraan yang luas, memanfaatkan sumber daya, melakukan monitoring dan evaluasi, akuntabilitas, serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat. Dimana seluruh prinsip tersebut nantinya saling melengkapi guna membangun wisata yang baik dan juga menarik.

Rusdiyana & Permatasari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Masyarakat untuk Mendukung Pengembangan Desa

Wisata Giripurno menjelaskan jika melakukan monitoring dan evaluasi adalah hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah menjalin kemitraan. Selain itu, dalam melakukan evaluasi terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan yakni tingkat kehadiran, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, serta peningkatan keterampilan.

Nurohman & Qurniawati (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pengembangan Desa Wisata Menggoro sebagai Wisata Halal menyatakan jika desa wisata dapat menonjolkan *icon* dari desa itu sendiri dengan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah desa sebagai penggerak dalam pengembangan desa wisata. Tidak hanya itu, adanya kolaborasi atau kemitraan dengan pihak-pihak lain yang dapat membantu penguatan desa wisata juga dibutuhkan agar nantinya terdapat program-program yang diangkat untuk dijadikan sebuah kebaruan dalam pengembangan desa wisata agar lebih menarik dan tidak kalah saing dengan yang wisata lainnya. Disisi lain, terdapat beberapa kelemahan yang sering ditemukan dalam pengembangan desa wisata yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata serta rendahnya kualitas penjaga keamanan yang membuat para pengunjung mengalami kehilangan barang atau mengalami pencopetan, sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkat pengunjung selanjutnya.

Pugra et al (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Kolaborasi Pentahelix untuk Pengembangan Desa Timpag Menuju Desa Wisata Berbasis Green Tourism yang mendeskripsikan bahwasanya dalam pengembangan desa wisata, pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, media massa, masyarakat dan pelaku wisata memainkan peranan yang sangat penting. Adanya keterlibatan dari seluruh pihak disini sangat dibutuhkan untuk membangun desa wisata, misalnya pemerintah desa sebagai pendukung pembangunan akses wisata, pihak akademisi yang dapat memberikan ilmu atau pengetahuan sebagai dasar pengembangan. Kemudian, untuk pihak media massa yang dapat membantu menyebarkan informasi terkait desa wisata agar dapat dikenal oleh masyarakat luas, pelaku wisata yang dapat membantu dengan menghadirkan kreativitasnya untuk menarik pengunjung serta peran masyarakat sebagai pengelola desa wisata.

Darmayanti et al (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Digital Marketing Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Tabanan menyebutkan jika dalam pengembangan desa wisata peran *digital marketing* sangat diperlukan untuk menunjang keberlanjutan desa wisata. Digital marketing akan memberikan informasi dan konten yang menarik karena dikemas dan disesuaikan dengan trend yang ada, sehingga membuat wisatawan lebih penasaran dan memutuskan untuk berkunjung langsung. Tidak hanya itu, dalam pengembangan desa wisata seluruh stakeholder yang terkait harus mampu membangun komitmen dan jiwa kompetitif agar mampu bersaing dengan wisata yang sejenis.

Syarifuddin (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Model Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ciburial menjelaskan jika dengan membentuk kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk terus meningkatkan kapasitas, maka hal tersebut akan berpengaruh pada pengembangan desa wisata. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat adalah kelompok yang akan mengelola wisata tersebut, dengan begitu sebelum berupaya untuk mengembangkan wisata pihak masyarakat harus terlebih dahulu meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya agar kedepannya masyarakat telah mempunyai modal atau strategi untuk membantu melakukan pengembangan desa wisata.

Suardika (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar menyebutkan jika dengan melahirkan destinasi wisata yang lebih baru tetapi kurangnya menjalin kolaborasi atau kemitraan, maka pengembangan desa wisata akan kurang efektif dan efisien. Hal ini didasari rendahnya promosi, keunikan produk yang tidak menonjol, serta citra desa yang tidak diketahui oleh khalayak. Dengan begitu, perlunya memahami kebutuhan pengunjung seperti trend wisata yang ada agar dapat dijadikan sebagai rujukan untuk membangun desa wisata yang berbeda dengan yang lainnya.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan hal yang sering didengar di kalangan pemerintah, akademisi, pihak swasta bahkan masyarakat. Adanya kebijakan merupakan bentuk batasan dalam setiap tugas dan tindakan yang akan dilakukan oleh setiap pihak, artinya kebijakan tersebut sebagai pedoman untuk melakukan fungsinya dengan sebagaimana mestinya. Beberapa pengertian kebijakan tentu memiliki makna tersendiri karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut Greer dan Paul Hoggett (Dikutip Nur & Guntur, 2019) kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekedar keputusan spesifik. Menurut Anderson (Dikutip Nur & Guntur, 2019) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sedangkan menurut Iskandar (Dikutip Dian Herdiana, 2018) kebijakan dapat didefinisikan sebagai rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi.

Sementara menurut William N. Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis: an Integrated Approach* memberikan kerangka proses pembuatan kebijakan (Dikutip Riedho & Angga, 2024) menyatakan jika dalam proses pembuatan kebijakan biasanya dilakukan oleh dua aktor utama yang saling berhubungan, yakni pembuat kebijakan (*policy maker*) dan analisis kebijakan. Pembuat Kebijakan atau *Policy Maker* merupakan aktor yang akan berperan dalam dalam beberapa hal meliputi a) *agenda setting* yakni akan merumuskan permasalahan atau isu publik; b) *policy formulation*, pihak yang terlibat mencari solusi atau alternatif untuk menjawab permasalahan; c) *adoption*, pihak yang terlibat mengadopsi kebijakan yang telah ditetapkan; d) implementasi kebijakan, artinya kebijakan yang telah diadopsi akan dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada; e) evaluasi kebijakan yakni melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, artinya dalam evaluasi ini akan melihat apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan yang terjadi di lapangan (William N. Dunn, 2018). Sedangkan analisis kebijakan adalah pihak

yang bertugas untuk memetakan dan menyajikan data berupa informasi yang jelas kepada *policy maker*.

2.2.2 Kemitraan

Kebijakan kemitraan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada pasal 34 telah disebutkan bahwa perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Kemitraan diartikan sebagai jalinan kerjasama yang telah disepakati atas dasar persamaan tujuan (Zuhairoh & Pattinasarany, 2021). Kemitraan merupakan jalinan kerja sama yang dilakukan antara individu, kelompok, atau organisasi guna meraih tujuan tertentu (Anshori, 2018). Kemitraan ini menggunakan sumber daya yang ada, agar dapat meraih tujuan yang sebelumnya ditetapkan (Rina et al., 2020). Dalam pelaksanaan kemitraan diperlukan komunikasi yang baik antar seluruh pihak, dikarenakan komunikasi merupakan unsur terpenting guna melancarkan proses kemitraan. Menurut undang-undang UMKM, konsep kemitraan merupakan bentuk kerjasama kontrak bisnis langsung atau tidak langsung, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah dan besar (Arifin et al., 2020). Dengan begitu, kemitraan yang terjalin harus dapat menguntungkan seluruh pihak yang terlibat, dan keuntungan tersebut harus seimbang antara yang satu dengan yang lainnya, karena pada intinya kemitraan tersebut ada, didasarkan dari keuntungan dan tujuan yang sama.

Sementara itu, penelitian ini relevan dengan teori *intergovernmental networking*. Menurut Warsono (2009) teori *intergovernmental networking* dikemukakan oleh Robert Agranoff pada tahun 2003, yang menyatakan jika lembaga akan melakukan kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teori tersebut merupakan salah satu cara yang digunakan dalam kemitraan tanpa harus berbasis pada hierarki dan legal-formal (Chandra & Triwidaryanta, 2022). Dalam proses pelaksanaannya, *intergovernmental networking* menekankan kepada seluruh aktor yang terlibat agar melakukan 2 strategi meliputi a) strategi ke dalam atau *game manajemen*; b) strategi keluar atau *network structure* (Sadat, 2019). Strategi ke dalam dimaksudkan bahwa dalam melakukan sebuah kerjasama dibutuhkan komitmen yang tinggi, maka pihak-pihak yang terlibat harus mampu

membangun kesadaran untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan kerjasama. Sedangkan, strategi keluar merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibuat oleh seluruh mitra yang dapat berupa peraturan, strategi pelaksanaan, pembagian tugas, dan lain sebagainya. Di sisi lain, teori ini mendeskripsikan bahwa kemitraan yang dilakukan tidak harus memiliki perjanjian hitam diatas putih, melainkan cukup dengan adanya kepercayaan antara mitra. Dengan begitu, konsep *intergovernmental networking* lebih menekankan kepercayaan dan kebersamaan dibandingkan dengan perjanjian resmi.

2.2.3 Pola Kemitraan

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 26 telah menyebutkan “Kemitraan dilaksanakan dengan pola; a) inti-plasma; b) subkontrak; c) waralaba; d) perdagangan umum; e) distribusi dan keagenan; dan f) bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti; bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing). Beberapa pola kemitraan diatas tentu mempunyai arti dan tujuan yang berbeda-beda, misalnya pola inti-plasma merupakan pelaksanaan kemitraan dengan usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Pola subkontrak berupa pelaksanaan kemitraan untuk memproduksi barang/jasa, dalam hal ini usaha besar akan memberikan dukungan seperti: bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak.

Kemitraan dengan pola waralaba yakni usaha besar yang memperluas usahanya dengan memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kemampuan. Kemitraan dengan pola perdagangan umum yakni bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. Kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan merupakan Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. Penyelenggara kemitraan dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan paparan diatas, maka kemitraan dalam penelitian ini merupakan kemitraan dengan model subkontrak, hal ini didasari dengan adanya estimasi waktu yang ditentukan dalam kemitraan, dimana pemerintah desa Sidomulyo dan mitra lainnya akan menjalankan kemitraan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Pola kemitraan subkontrak dapat melahirkan keterampilan, ahli teknologi dan menjamin produk mitra (Uswatun Hasanah, Annisa Ilmi Faried, 2022). Hal ini sejalan dengan kemitraan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Sidomulyo yang dibuktikan dengan adanya pelatihan manajemen pengelola Desa Wisata yang berbasis pada teknologi, pelatihan pengembangan usaha dalam pengembangan desa wisata, serta membentuk inovasi dalam paket wisata guna meningkatkan kualitas wisata di Desa Sidomulyo.

2.2.4 Evaluasi

Evaluasi merupakan cara untuk melakukan penilaian terhadap sesuatu, dimana evaluasi harus memiliki indikator atau kriteria dalam penilaiannya (Rahmawati & Yaswinda, 2022). Evaluasi diartikan sebagai kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan indikator keberhasilan maupun kelemahan terhadap program, sehingga evaluasi ini nantinya akan dijadikan rujukan rencana untuk keberlanjutan program tersebut (Putra et al., 2023). Disisi lain, evaluasi dikatakan sebagai salah satu cara untuk mengukur sejauh mana program berjalan dalam mencapai tujuannya. Fionita et al (2024) menyatakan jika prinsip-prinsip evaluasi mencakup a) prinsip berkesinambungan, artinya program yang disepakati dilakukan secara berlanjut; b) prinsip menyeluruh, artinya dalam seluruh bidang atau aspek dalam program dilakukan evaluasi tanpa terkecuali; c) prinsip objektif, artinya prinsip ini menekankan jika dalam pelaksanaan program tidak boleh melibatkan kepentingan pribadi; d) prinsip sah, artinya mencakup prinsip yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.

2.2.5 Evaluasi Kemitraan

Evaluasi kemitraan merupakan proses yang dilakukan ketika meninjau program kemitraan, tinjauan ini berfungsi untuk melihat pencapaian baik dari program tersebut dan hal yang harus diperbaiki (Zinaida et al., 2023). Evaluasi ini penting dilakukan mengingat jika evaluasi merupakan salah satu tahapan dari kebijakan. Menurut William Dunn dalam (Mendrofa et al., 2024) tahap-tahap

kebijakan meliputi a) penyusunan agenda; b) formulasi kebijakan; c) tahap adopsi kebijakan d) tahap implementasi kebijakan; dan e) tahap evaluasi kebijakan.

Tahap penyusunan agenda merupakan sebuah fase untuk melihat bagaimana masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dalam hal ini pihak yang terlibat harus mencari berbagai permasalahan, kemudian memetakan permasalahan tersebut untuk mendapatkan penanganan yang prioritas dibandingkan dengan permasalahan yang lain. Jika dalam evaluasi kemitraan di Desa Sidomulyo, maka tahap ini merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo untuk menentukan mitra strategis, dan selanjutnya bekerjasama dengan mitra menentukan fokus permasalahan pengembangan Desa Wisata di Desa Sidomulyo.

Tahap formulasi kebijakan adalah tahap dimana pembuat kebijakan atau aktor yang terlibat akan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya tahap adopsi kebijakan yang merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya, artinya dalam tahap ini aktor yang terlibat akan mengusulkan berbagai cara, kemudian akan disepakati cara mana saja yang akan dilakukan. Dalam hal ini, evaluasi kemitraan yang dilakukan terhadap pemerintah Desa Sidomulyo merupakan evaluasi rencana dan strategi yang ingin dilakukan mitra dalam melakukan pengembangan Desa Wisata di Desa Sidomulyo.

Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari program atau kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun jika dalam tahap evaluasi kemitraan, maka tahap ini merupakan tahapan proses artinya kegiatan-kegiatan akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh mitra, namun dalam proses implementasi kegiatan ini tidak menutup kemungkinan jika terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dikarenakan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, tahap evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir yang dilakukan dalam tahapan kebijakan, tahapan ini berfungsi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Dengan begitu jika dalam evaluasi kemitraan di Desa Sidomulyo, maka tahap evaluasi ini merupakan tahapan evaluasi hasil artinya apakah tujuan dari kemitraan tercapai, apakah program yang dihadirkan memberikan kebermanfaatan, serta apakah output kegiatan tersebut memecahkan masalah.

Selain itu Program kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Sidomulyo mengenai pengembangan desa wisata mengacu pada beberapa peraturan diantaranya *pertama* RPJMDes 2020-2025 Desa Sidomulyo dimana pengembangan desa wisata dijadikan sebagai program dan kegiatan prioritas pembangunan desa, khususnya pada bidang pariwisata yang menyebutkan jika 1) pembangunan, peningkatan kualitas dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang desa wisata, 2) fasilitasi dan operasional pengembangan desa wisata.

Kedua Surat Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Tentang Pengangkatan Pengelola Desa Wisata Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu Periode 2022-2027. Pada SK tersebut telah disebutkan jika pengelola desa wisata mempunyai tugas salah satunya yakni “mengelola pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.

Ketiga Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, dimana pada Bab III Pasal 4 telah disebutkan jika “ RKP Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2022 merupakan penjabaran RPJM Desa Sidomulyo Tahun 2020-2025 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKP Desa Sidomulyo Tahun Anggaran sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, kerja sama antar desa dan pihak ketiga dan yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pelaksana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran.”

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan jika sebagai desa yang memiliki potensi bunga, maka pemerintah Desa Sidomulyo berupaya untuk memanfaatkan hal itu dengan menjadikan Desa Sidomulyo sebagai desa wisata. Tetapi dalam mewujudkan pengembangan desa wisata pemerintah desa tidak bisa berjalan sendiri, dengan begitu dibutuhkan pihak-pihak lain yang dapat membantu terwujudnya hal tersebut. Sejak tahun 2020 Pemerintah Desa Sidomulyo, tim Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Universitas Brawijaya, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Kelompok Tani Tanaman Hias, UKM Batik Sidomulyo, dan Dinas Pariwisata Kota Batu telah melakukan kemitraan hingga tahun 2022.

2.2.6 Model Evaluasi

Muryadi (2017) menjelaskan beberapa model evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya: *pertama Discrepancy Model* (Provus), evaluasi dalam model ini disebut juga sebagai evaluasi model kesenjangan. Dalam model ini tahap untuk mengukur evaluasi meliputi desain, instalasi, proses, produk dan membandingkan. Dengan begitu kesenjangan yang akan dianalisis diantaranya: a) kesenjangan antara rencana terhadap pelaksanaan program; b) kesenjangan yang diperkirakan sebelumnya dengan yang didapatkan di lapangan; c) kesenjangan antara status kemampuan status kemampuan dengan standar kemampuan; d) kesenjangan tujuan; e) kesenjangan tentang program yang dapat diubah; dan f) kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten.

Kedua CIPP Model (Daniel Stufflebeam's), model evaluasi yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam mempunyai beberapa indikator yang dijadikan sebagai patokan dalam melakukan evaluasi. Adapun indikator tersebut meliputi: a) Evaluasi konteks (*context*) dimaksud untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan, masalah, dan potensi yang menunjang sebagai bahan untuk menentukan rencana program; b) Evaluasi *input* merupakan tahap untuk mengevaluasi bagaimana masukan-masukan untuk melaksanakan program seperti rencana program, tugas dan fungsi aktor yang terlibat, pembiayaan, jadwal kegiatan program hingga strategi yang digunakan; c) evaluasi proses (*process*) digunakan untuk mengevaluasi bagaimana keberlangsungan program tersebut apakah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati; d) evaluasi produk (*product*) adalah tahap evaluasi yang melihat hasil dari program tersebut apakah sesuai dengan target capaian atau tujuan program.

Ketiga Responsive Evaluation Model (Robert Stake's), model ini menekankan evaluasi dengan model pendekatan kualitatif-naturalistik, dikarenakan model ini kurang percaya terhadap hal yang bersifat kuantitatif. Adapun langkah-langkah evaluasi dalam model ini yakni observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal (*preliminary understanding*) dan mengembangkan desain atau model. Kekurangan dalam model ini yakni pembuat keputusan sulit untuk menentukan prioritas karena tidak dapat menerima semua

sudut pandang dari berbagai pihak, sedangkan kelebihanannya yakni lebih peka terhadap pandangan berbagai pihak.

Keempat Formative-Sumatif Evaluation Model (Michael Scriven's), evaluasi formatif merupakan model evaluasi yang dilakukan pada saat program tersebut sedang dalam pelaksanaan, artinya evaluasi ini digunakan sebagai umpan balik secara berkala untuk membantu pengembangan dari program. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program telah selesai karena model ini menilai bagaimana kebermanfaatan dan keefektifan program tersebut, maka evaluasi formatif dilaksanakan untuk menentukan program tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan.

Kelima Measurement Model (Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel), model pengukuran atau *Measurement Model* merupakan model evaluasi yang berfokus pada aspek tingkah laku untuk mengetahui perbedaan individu atau kelompok dalam program. Evaluasi model ini, biasanya digunakan dalam bidang pendidikan, yang dimana indikator yang digunakan seperti hasil belajar, minat, tingkah laku peserta didik, sikap bahkan aspek kepribadian peserta didik.

Keenam Goal-Free Evaluation Approach (Michael Scriven's), model evaluasi bebas tujuan merupakan model evaluasi yang berfokus pada hasil sebenarnya dibandingkan hasil yang direncanakan sebelumnya, dikarenakan model ini menganggap jika tujuan program adalah formalitas sehingga program yang telah terlaksana jarang menunjukkan tujuan sebenarnya, singkatnya tujuan tersebut telah berubah. Penggunaan model evaluasi bebas akan melakukan evaluasi menggunakan berbagai laporan dan catatan konkrit yang diinginkan dalam program maupun yang tidak diinginkan.

Dari beberapa model evaluasi diatas dapat diketahui bahwa setiap model memiliki indikator-indikator tertentu dalam melakukan penilaian program. Adapun model evaluasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan evaluasi kemitraan dalam pengembangan desa wisata di Desa Sidomulyo Kota Batu yakni Model CIPP (*context, input, process, product*). Pemilihan model evaluasi ini dilatarbelakangi oleh indikator evaluasi yang terarah, dan lebih sistematis dibandingkan metode lainnya. Dengan begitu hasil analisis nantinya dapat disajikan secara struktur dan jelas, serta dapat dijadikan dasar oleh Desa Sidomulyo maupun pembaca dalam

pengambilan keputusan terkait kemitraan dalam pengembangan desa wisata di masa yang akan datang.

2.2.7 Pengembangan

Pengembangan merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk meningkatkan sesuatu, dengan begitu pengertian dari pengembangan memiliki arti yang berbeda karena tergantung pada konteksnya. Pengembangan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Siregar et al., 2024). Sementara itu, pengembangan memiliki arti sebagai usaha yang dilakukan individu-individu, kelompok-kelompok untuk membantu memenuhi kebutuhannya (Meylina Astuti et al., 2023). Dengan begitu, dalam melakukan pengembangan terdapat proses perencanaan, penyusunan, dan kegiatan yang dilakukan agar hasilnya dapat menjadi acuan yang digunakan untuk meraih tujuan (Meylina Astuti et al., 2023).

2.2.8 Desa Wisata

Pengembangan desa wisata merupakan hal penting karena memberikan dampak yang besar kepada masyarakat, dimana masyarakat disini sebagai pengawas proses perkembangan hingga keuntungan yang didapatkan (Widiastuti, 2012). Pengembangan desa wisata akan melibatkan masyarakat secara langsung, karena masyarakat yang akan merasakan baik atau buruknya dampak dari pengembangan desa wisata. Dengan begitu, perkembangan desa wisata diharapkan akan setara dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan (Wahyuningsih & Pradana, 2021).

2.2.9 Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan wisata desa dengan meningkatkan fasilitas demi kenyamanan pelaku wisata (Rahman, 2021). Pengembangan desa wisata diartikan sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan di skala desa di seluruh Indonesia, sehingga dengan melakukan pengembangan ini perekonomian masyarakat dapat meningkat dan kelestarian budaya lokal terus terjaga (Soeswoyo, 2021). Namun demikian, dalam melakukan pengembangan desa wisata baik pemerintah desa maupun masyarakat harus dapat bekerjasama dalam melakukan pengembangan desa wisata, dikarenakan jika tidak ada misi yang sama antar keduanya maka pengembangan

tersebut akan sulit mencapai tujuannya. Selanjutnya, wisata pedesaan juga sangat berperan penting terhadap keberlangsungan perekonomian desa dan masyarakatnya (Tou et al., 2021).

Azizah & Ilyas (2023) menyebutkan jika dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata terdapat tahapan model meliputi a) pengembangan kelembagaan yakni sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia; b) pengembangan objek dan daya tarik wisata yakni pemetaan potensi desa yang dapat ditingkatkan; c) pengembangan sarana dan prasarana agar pengunjung dapat mendapatkan kenyamanan. Selain itu, untuk mencapai tujuan pengembangan desa wisata diperlukan strategi yang baik seperti membuat *master plan*, menyadarkan masyarakat untuk ikut berperan dalam pengembangan desa wisata, peran aktif pemerintah, perbaikan sarana dan prasarana, bekerjasama dengan investor, menghadirkan sektor usaha pendukung, serta memaksimalkan wisata (Ratwianingsih et al., 2021).

2.2.10 Dampak Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu desa yang memiliki kearifan lokal yang didalamnya terdapat budaya, adat istiadat, potensi alam dan mempunyai kapasitas untuk menjadi sebuah wisata. Dengan adanya kapasitas tersebut, maka hal ini akan mendorong daerah pedesaan untuk menjadi tempat yang unik dan menarik, sehingga mendukung perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan melakukan pengembangan desa wisata maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat (Geopani Pakpahan et al., 2024). Kehadiran desa wisata merupakan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mempunyai kepedulian dan kesiapan daya tarik untuk mendukung pengembangan desa wisata (Aminuddin et al., 2022).

Disisi lain, Wahyuni & Susilowati (2020) menyebutkan jika dalam pengembangan desa wisata akan ada beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat meliputi dampak pada bidang ekonomi, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat. Pada bidang ekonomi desa wisata akan memberikan peluang kepada masyarakat guna meningkatkan ekonomi mereka, misalnya petani bunga yang hanya bergantung kepada penjualan bunga, kini dapat terbantu dengan adanya wisata edukasi bunga. Dampak terhadap lingkungan, artinya dengan hadirnya desa

wisata ditengah masyarakat maka masyarakat akan lebih peduli terhadap alam sekitar, misalnya sebelum adanya desa wisata masyarakat terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya, sedangkan setelah menjadi desa wisata mereka lebih memilih mendaur ulang sampah tersebut dan juga membuang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, masyarakat akan mempunyai rasa empati kepada lingkungan dan membuat kelestarian lingkungan desa terjaga. Dampak terhadap kehidupan sosial, sebagai desa yang sering dikunjungi oleh wisatawan membuat masyarakat lebih produktif untuk mencari ide-ide terbaru agar desa wisata mereka dapat dikenal berbeda dengan desa wisata yang lainnya.

